



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Analisis Kritis Pelibatan *Stakeholders* dalam Formulasi
dan Implementasi Kebijakan Pengembangan Animasi
Film dan Telematika di Kota Cimahi**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Sarjana
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh

Ratih Elizabeth

2014310068

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Analisis Kritis Pelibatan *Stakeholders* dalam Formulasi
dan Implementasi Kebijakan Pengembangan Animasi
Film dan Telematika di Kota Cimahi**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Sarjana

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh

Ratih Elizabeth

2014310068

Pembimbing

Tutik Rachmawati, Ph. D

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Persetujuan Skripsi

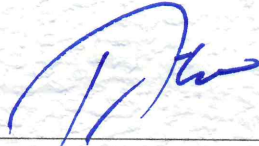
Nama : Ratih Elizabeth
Nomor Pokok : 2014310068
Judul : Analisis Kritis Pelibatan *Stakeholder* dalam Formulasi dan Implementasi Kebijakan Pengembangan Animasi Film dan Telematika Kota Cimahi

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 11 Januari 2018
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

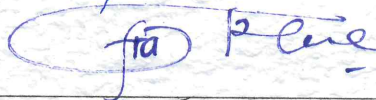
Ketua sidang merangkap anggota

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

: 

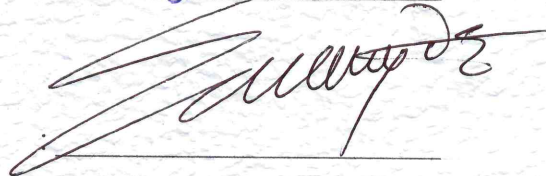
Sekretaris

Tutik Rachmawati, Ph.D.

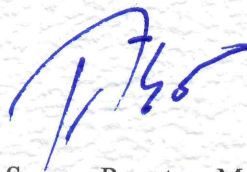
: 

Anggota

Elivas Simatupang, SE., M.Sc.

: 

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ratih Elizabeth

NPM : 2014310068

Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Analisis Kritis Pelibatan Stakeholders dalam Formulasi dan Implementasi Kebijakan Pengembangan Animasi Film dan Telematika di Kota Cimahi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, Januari 2018



Ratih Elizabeth

ABSTRAK

Nama : Ratih Elizabeth

NPM : 2014310068

Judul : Analisis Kritis Pelibatan *Stakeholders* dalam Formulasi dan Implementasi Kebijakan Pengembangan Animasi Film dan Telematika Kota Cimahi

Penelitian ini bertujuan menganalisa keterlibatan *stakeholder* dalam formulasi dan implementasi serta respon masyarakat terhadap keterlibatan *stakeholder* dalam kebijakan pengembangan animasi film dan telematika di Kota Cimahi. Penelitian ini menggunakan teori analisa stakeholder dengan tahap yaitu (1) Mengidentifikasi para pemangku kepentingan/*stakeholder* beserta kepentingannya melalui teori aktor yang terlibat dalam formulasi dan implementasi kebijakan (2) Mengelompokkan atau mengkategorisasikan para pemangku kepentingan/*stakeholder*, dan (3) Mendalami hubungan antar pemangku kepentingan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, dan wawancara. Selain itu peneliti juga menggunakan kuesioner sebagai cara pengumpulan data respon masyarakat. Penelitian ini difokuskan terhadap 9 SKPD Kota Cimahi dengan 9 *key persons* dan kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 214 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan *stakeholder* dalam formulasi dan implementasi kebijakan masih belum baik. Hal tersebut karena masih terdapat beberapa *stakeholder* yang tidak dilibatkan dan terlibat dalam kebijakan pengembangan animasi film dan telematika.

Kata kunci: Keterlibatan *Stakeholder*, Formulasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Kebijakan Pengembangan Animasi Film dan Telematika.

ABSTRACT

Name : Ratih Elizabeth

NPM : 2014310068

Title : Critical Analysis of Stakeholders Involvement in Formulation and Implementation of Cimahi City Animation Film and Telematics Development Policy.

This research aims to analyze the involvement of stakeholders in policy formulation and policy implementation, and community response for stakeholders involvement in animation film and telematics development policy in Cimahi City. This research uses stakeholders analysis theory, which consist of (1) Identifying stakeholders and their interests; through the theory of actors involved in policy formulation and implementation, (2) Categorizing stakeholders, and (3) understanding the relationships between stakeholders.

This research uses qualitative method with the type of research is qualitative descriptive. Researchers use data collection techniques through document studies, and interviews. Also the researchers also used questionnaires as a way of collecting community response data. This study focused on 9 SKPD in Cimahi with 9 key persons and questionnaires submitted to 214 respondents representing Cimahi City community. The results of this research shows that stakeholder involvement in policy formulation and policy implementation is still not good, because there are some stakeholders who are not involved in Animation Film and Telematics Development Policy.

Keywords: Stakeholder Involvement, Policy Formulation, Policy Implementation, Animation Film and Telematics Development Policy

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah “Analisis Kritis Pelibatan *Stakeholder* dalam Formulasi dan Implementasi Kebijakan Pengembangan Animasi Film dan Telematika Kota Cimahi”. Karya tulis ilmiah ini diajukan guna memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik jenjang pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, banyak kesalahan yang mungkin penulis buat. Setiap saran dan kritik yang membangun diharapkan agar dapat membuat skripsi ini menjadi lebih baik. Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis menyadari bahwa akan sulit terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Sehingga dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah senantiasa menjadi tempat pertama bagi penulis untuk mencurahkan berbagai hal. Untuk kedua orangtua penulis, Mama Tercinta Ayu Susanti Trisnadewi dan Papa Tercinta Ketut Wirdayasa, SE terimakasih banyak atas segala doa, kesabaran, cinta dan kasih sayang, dukungan yang tidak pernah berhenti, dan segala sesuatu yang telah diberikan. Serta kepada Ibu Tutik Rachmawati, Ph.D selaku dosen pembimbing dan Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik, penulis sampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih atas kesabarannya dalam

membimbing dan selalu memberikan waktu dalam memberikan pengetahuan mengenai cara dan proses untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Dalam kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak Trisno Sakti selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
4. Ibu Susana Ani, Ibu Gina Ningsih Yuwono, Ibu Indraswari, Bapak Andoko, Bapak Kristian Widya Wicaksono, Bapak Ulber Silalahi, Bapak Hubertus Hasan, Bapak Dudung Sumahdumin, Bapak Meindy Mursal, Bapak Pius Suratman Kartasasmita, Bapak Deni M dan segenap Dosen Pengajar serta pegawai Tata Usaha yang telah memberikan pembelajaran, baik moral maupun materil kepada penulis selama berada di Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.
5. Adik tercinta David Arya Wisesa, terimakasih untuk semangat, dukungan, dan doanya.
6. Made Aldibunggi yang selalu ada setiap saat, yang selalu menyemangati setiap hari dan memberikan berbagai masukan yang bermanfaat.
7. Untuk sahabat – sahabat tercinta Kadek Firdhayanti, Agatha Risky, Surtha Tesselonica, Nida Imansari, Chaecyilia F. Kuna, Katharine Marlian,

Tessalonika Febyrianty, dan Anna Bella terimakasih atas dukungan, hiburan, dan menjadi tempat curahan hati peneliti.

8. Teman – teman kelompok Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Agatha Risky, Ali S. Basit, Cyril Reyhandi, dan Irna Nursyafitri.
9. Teman seperjuangan skripsi Agatha Risky, Aquilina Lati, dan Desi Sartika, Vinsensia Patricia Nandia E. terimakasih atas semangat dan dukungan yang diberikan.
10. Teman – teman Administrasi Publik angkatan 2014, 2015, dan 2016, Himpunan Administrasi Publik terimakasih atas dukungannya.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian penelitian ini, dimana pun kalian berada terimakasih banyak untuk segalanya.

Tuhan Yang Maha Esa akan membalas setiap orang yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, peneliti berharap semoga hasil penelitian skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Bandung, Januari 2018

Ratih Elizabeth

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bagian Penelitian & Pembangunan (LITBANG), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Pemerintah Kota Cimahi.

Penelitian ini merupakan salah satu dari tiga sub-penelitian dari penelitian utama berjudul “Evaluasi Kebijakan Pengembangan Animasi Film dan Telematika Kota Cimahi” yang didanai oleh BAPPEDA Pemerintah Kota Cimahi.

Ucapan terima kasih disampaikan secara khusus kepada Bapak Elivas Simatupang, SE., M. Sc. selaku Kepala Bagian Litbang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang telah membantu penyelesaian penelitian ini. Tanpa bantuan, bimbingan, perhatian, dan semangat Beliau, penelitian ini tidak akan selesai. Peneliti berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Cimahi dalam memperbaiki Kebijakan Pengembangan Animasi Film dan Telematika.

Bandung, Januari 2018

Ratih Elizabeth

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Penelitian	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Konsep Kebijakan Publik.....	9
2.1.1 Definisi Kebijakan Publik	9
2.1.2 Tahapan Kebijakan Publik.....	11
2.1.3 Pentingnya Stakeholder dalam Kebijakan Publik.....	12
2.2 Formulasi Kebijakan Publik.....	13
2.2.1 Tahap – Tahap dalam Perumusan Kebijakan	13
2.2.2 Aktor/Stakeholder yang Terlibat dalam Formulasi Kebijakan Publik	15
2.3 Implementasi Kebijakan Publik	18
2.3.1 Definisi Implementasi Kebijakan Publik	18
2.3.2 Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan Publik.....	18

2.3.3	Aktor yang Terlibat dalam Implementasi Kebijakan Publik	20
2.4	Konsep <i>Stakeholder</i>	22
2.4.1	Pengertian <i>Stakeholder</i>	22
2.4.2	Kategori <i>Stakeholder</i>	23
2.4.3	Metode Analisis <i>Stakeholder</i>	25
2.4.4	Kriteria Menganalisis Keterlibatan <i>Stakeholder</i> yang Diidentifikasi	27
2.5	<i>Place Branding</i> dan <i>City Branding</i> sebagai Bagian dari Kebijakan Publik	27
2.5.1	<i>Place Branding</i>	28
2.5.2	<i>City Branding</i>	29
2.6	Model Penelitian	29
BAB III METODE PENELITIAN		31
3.1	Tipe Penelitian	31
3.2	Peran Peneliti	32
3.3	Metode Analisis <i>Stakeholder</i>	32
3.4	Operasionalisasi Variabel	35
3.5	Sumber Data	42
3.6	Prosedur Pengumpulan Data	44
3.6.1	Wawancara	44
3.6.2	Studi Dokumen	45
3.6.3	Kuesioner/ Angket	46
3.7	Analisis Data	50
3.7.1	Analisis Data Kualitatif	50
3.8	Pengecekan Keabsahan Temuan	52
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN		54

4.1 Identifikasi <i>Stakeholders</i> dalam Kebijakan Pengembangan Animasi Film dan Telematika di Kota Cimahi	55
4.1.1 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Cimahi	56
4.1.2 Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian (Disdagkoperin) Kota Cimahi.....	61
4.1.3 Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan (Diskominfoarfus) Kota Cimahi	65
4.1.4 Setda Bagian Ekonomi Kota Cimahi	67
4.1.5 Bappeda Kota Cimahi	70
4.1.6 DPRD Kota Cimahi.....	73
4.1.7 Kejaksaan Negeri Kota Cimahi	74
4.1.8 UPT Technopark Kota Cimahi	76
4.1.9 Cimahi Creative Association (CCA).....	78
4.1.10 Masyarakat Kota Cimahi.....	80
BAB V TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	83
5.1.1 Pemeran Serta Resmi	88
5.1.2 Pemeran Serta Tidak Resmi.....	101
5.2 Keterlibatan <i>Stakeholders</i> dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Animasi Film dan Telematika di Kota Cimahi.....	107
5.2.1 Eksekutif dan Birokrasi (Pemerintah)	107
5.2.2 Pihak Swasta dan Civil Society Organization (CSOs).....	118
5.3 Hubungan antara Para Pemangku Kepentingan/ <i>Stakeholder</i>	124
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	128
6.1 Kesimpulan.....	128
6.2 Saran	134

6.3 Rekomendasi Kebijakan	136
DAFTAR PUSTAKA.....	138

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1 Diagram Kepentingan dan Pengaruh Para Pemangku Kepentingan.	25
Gambar V-1	92
Gambar V-2	95
Gambar V-3	99
Gambar V-4	100
Gambar V-5	103
Gambar V-6	106
Gambar V-7	116
Gambar V-8	121
Gambar V-9	121
Gambar V-10	123

DAFTAR TABEL

Tabel III-1 Badan – Badan Administrasi (Agen – Agen Pemerintah).....	35
Tabel III-2 Lembaga Eksekutif.....	36
Tabel III-3 Lembaga Yudikatif.....	37
Tabel III-4 Lembaga Legislatif.....	37
Tabel III-5 Kelompok – Kelompok Kepentingan.....	38
Tabel III-6 Partai – Partai Politik.....	38
Tabel III-7 Warga Negara Individu	38
Tabel III-8 Eksekutif atau Pemerintah	39
Tabel III-9 Birokrasi	39

Tabel III-10 Legislatif.....	40
Tabel III-11 Sektor Swasta.....	40
Tabel III-12 <i>Civil Society Organizations</i>	41
Tabel III-13 Prosedur Pengumpulan Data.....	46
Table 4-1 Jenis Kelamin.....	80
Tabel 4-2 Tingkat Pendidikan	81
Table 4-3 Umur dan Lama tinggal di Cimahi	81
Tabel 4-4 Jenis Lapangan Pekerjaan	82
Tabel V-1.....	84
Tabel V-2.....	105
Tabel V-3.....	109
Tabel V-4.....	109
Tabel V-5.....	111
Tabel V-6.....	112
Tabel V-7.....	120
Tabel V-8 Hubungan antar Pemangku Kepentingan dalam Kebijakan Pengembangan Animasi Film dan Telematika.....	124

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Panduan dan Hasil Wawancara

Lampiran 2: Kuesioner

Lampiran 3: Surat Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis.¹ Proses kebijakan publik merupakan suatu siklus yang harus dilalui oleh suatu kebijakan publik yang dimulai dari penetapan agenda, formulasi, adopsi, implementasi dan evaluasi. Dalam setiap tahapan kebijakan tersebut, sejak tahap formulasi kebijakan hingga evaluasi kebijakan, sangat dibutuhkan peran serta dan keterlibatan seluruh *stakeholder* atau pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan kebijakan tersebut sehingga kebijakan yang terbentuk akan mencapai tujuan dan menghasilkan dampak yang diharapkan.² *Stakeholder* dalam kebijakan publik dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni *stakeholder* yang secara resmi dilibatkan dan *stakeholder* yang secara tidak resmi terlibat. *Stakeholder* yang secara resmi dilibatkan misalnya adalah agen-agen pemerintah (birokrasi), eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

¹ Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik (Pendelegasian TanggungJawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan)* (Jakarta pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (pers), 2014)

² A. Heryani, *Paradigma Kebijakan Publik* (Bandung: Unpad Press, 2010), 122.

Sedangkan mereka yang termasuk ke dalam kelompok *stakeholder* yang secara tidak resmi terlibat adalah kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, dan individu – individu dalam sebuah negara (warga negara).³

Tahapan evaluasi kebijakan dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan penilaian apakah kebijakan yang telah dilaksanakan telah mencapai tujuan seperti yang diharapkan atau belum/tidak. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak.⁴ Perlu menjadi catatan penting bahwa evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir pelaksanaan sebuah kebijakan namun juga dalam tahapan formulasi dan implementasi kebijakan.

Formulasi kebijakan merupakan tahapan yang paling awal di dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Dalam tahap ini, masing – masing alternatif kebijakan diberikan penilaian untuk selanjutnya akan dipilih alternatif kebijakan yang dapat diputuskan untuk dilaksanakan sebagai cara untuk memecahkan masalah. Dalam setiap penilaian alternatif tersebut, setiap aktor (atau stakeholder, baik yang resmi dilibatkan maupun tidak secara resmi terlibat) akan ikut berperan dalam memberikan penilaian dan usulan alternatif pemecahan masalah terbaik.⁵

Tahap kebijakan selanjutnya yaitu implementasi kebijakan merupakan tahapan dimana setiap alternatif terbaik untuk memecahkan permasalahan yang telah dibahas dalam tahapan sebelumnya akan dilaksanakan. Dalam tahapan ini yang

³ B. Winarno, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)* (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014), 126.

⁴ J. E Anderson, *Public Policy Making*, (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1969) dikutip dari B. Winarno, *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif* (Yogyakarta: CAPS, 2016) Hlm 193.

⁵ *Op.Cit*, 36.

terlibat bukan hanya kelompok formal saja seperti eksekutif, birokrasi, legislatif. Namun juga kelompok informal yaitu sektor swasta dan *Civil Society Organizations* (CSOs).⁶

Setiap pemerintah daerah otonom yang ada di Indonesia pasti akan melaksanakan kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di daerahnya. Berbagai macam kebijakan yang dibuat pemerintah daerah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan publik seperti kesehatan, pendidikan, kemiskinan, dan ekonomi. Demikian halnya dengan Pemerintah Kota Cimahi, kebijakan untuk permasalahan ekonomi yang dilaksanakan adalah kebijakan pengembangan animasi film dan telematika berbasis pengembangan ekonomi lokal yang mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam pengimplementasian kebijakan. Kebijakan pengembangan animasi dan telematika Pemerintahan Kota Cimahi memiliki dasar legal formal yaitu dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi dengan mengembangkan 4 (empat) klaster industri yaitu (1) klaster makanan dan minuman; (2) klaster kerajinan; (3) klaster telematika dan (4) klaster TPT (Tekstil dan Produk Tekstil). Pengembangan keempat klaster tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Kota Cimahi yang memiliki keterbatasan sumberdaya alam. Pada awal implementasi kebijakan ini, *Cimahi Creative Association* (CCA) bertanggung jawab terhadap pengembangan keempat klaster tersebut, Namun saat ini *Cimahi Creative Association* hanya berfokus pada klaster telematika yaitu

⁶ E. Purwanto dan D. Sulistyastusi, *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Gava Media, 2012), Hlm 38

pada animasi film saja.⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pejabat Pemerintah Kota Cimahi dapat dipahami bahwa klaster telematika yang berfokus pada animasi film merupakan ujung tombak dari kebijakan pengembangan animasi film dan telematika dengan pendekatan *city branding* menjadikan Kota Cimahi sebagai Kota Animasi dan Film.⁸

Pendekatan *city branding* sebagai bagian kebijakan pengembangan animasi film dan telematika pemerintah Kota Cimahi yang mengusung konsep Cimahi sebagai “Kota Animasi dan Film” ini telah dianggap berhasil. Keberhasilan tersebut dibuktikan dengan adanya kemajuan – kemajuan terjadi di Kota Cimahi. Di Kota Cimahi telah terdapat berbagai karya dan produk kreatif seperti film seri animasi, *digital content* dan multimedia pendidikan, *games* dan *virtual reality*.⁹ Bahkan Kota Cimahi berhasil menyelenggarakan *event* tahunan berupa festival secara berturut – turut dari tahun 2013 hingga 2017 yang dinamakan dengan BIAF (*Baros International Animation Festival*) dengan tujuan agar untuk meningkatkan jumlah transaksi bisnis di wilayah Kota Cimahi.¹⁰

Purwanto dkk (2015) berpendapat bahwa tanpa adanya keterlibatan dari *stakeholder*, sebuah kebijakan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, karena salah satu aspek penting yang memberikan pengaruh terhadap

⁷ Hasil Wawancara dengan R, Ketua Event CCA (9 Mei 2017, pukul 14.00)

⁸ Hasil Wawancara dengan A, Kepala Bidang UMKM (2 Oktober 2017, pukul 13.10)

⁹ Cakrawalamedia, ‘Kota Cimahi Kembali Gelar Baros International Animation Festival 2017’ <https://www.cakrawalamedia.co.id/kota-cimahi-kembali-gelar-baros-internasional-animation-festival-2017/> (06.10.17)

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Pak Elivas, Kepala Bagian Litbang Bappeda

keberhasilan kebijakan adalah keterlibatan dari para *stakeholder*.¹¹ Demikian pula halnya dengan pendekatan *city branding* Kota Cimahi sebagai Kota Animasi dan Film yang merupakan bagian dari kebijakan pengembangan animasi film dan telematika. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam mewujudkan *city branding* merupakan faktor penentu keberhasilannya.¹²

Pendekatan *city branding* Kota Cimahi sebagai Kota Animasi dan Film di Kota Cimahi ini melibatkan sejumlah para pemangku kepentingan yaitu (1) DPRD Kota Cimahi; (2) Kejaksaan Negeri Cimahi; (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda); (4) Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian (Disdagkoperin); (5) Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP); (6) Dinas Kominfoarfus; (7) Setda Bagian Ekonomi; (8) *Cimahi Creative Association* (CCA), dan (9) UPTB *Technopark*. Setiap *stakeholders* tersebut memainkan peranan dan kepentingannya masing – masing di dalam kebijakan pengembangan animasi dan telematika Kota Cimahi ini.

Temuan – temuan awal yang merupakan hasil observasi dan wawancara oleh peneliti mengindikasikan bahwa keterlibatan *stakeholder* yang ada dalam formulasi dikatakan masih belum baik karena Diskominfoarfus dan juga masyarakat tidak terlibat dalam perumusan kebijakan pengembangan animasi dan telematika ini. Dari hasil wawancara dengan BSP Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Layanan TIK di Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi, dinasnya tidak dilibatkan atau terlibat dalam tahapan

¹¹ Purwanto, Erwan A dan Sulistyastuti, Dyah R, Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Yogyakarta: Gava Media, 2015, Hlm 20.

¹² C. Ooi, dan J. Pedersen, 'City Branding and Film Festivals: Re-evaluating Stakeholder's Relations' Place Branding and Public Diplomacy, Vol. 6 (2010): 329.

perumusan kebijakan pengembangan animasi dan telematika, namun pada saat pelaksanaan kebijakan tersebut mereka menyediakan *support IT*.¹³ Warga masyarakat Kota Cimahi tampaknya juga tidak dilibatkan atau terlibat dalam perumusan kebijakan pengembangan animasi dan telematika. Dari hasil wawancara dengan M salah satu perwakilan masyarakat, ia tidak pernah mengetahui bahwa ada kebijakan pengembangan animasi film dan telematika di Kota Cimahi karena tidak pernah terlibat dalam sebuah musyawarah dan juga tidak pernah diajak berdiskusi oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam perumusan kebijakan pengembangan animasi film dan telematika.¹⁴ Temuan - temuan awal di lapangan oleh peneliti juga mengindikasikan bahwa keterlibatan *stakeholder* dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan pengembangan animasi film dan telematika dikatakan masih belum baik karena masih ada *stakeholder* yang belum berperan dengan baik dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan saudara AS masyarakat Kota Cimahi sebagai berikut:¹⁵

“Saya tidak mengetahui ada kebijakan pengembangan animasi film dan telematika di Kota Cimahi karena Pemerintah Kota Cimahi tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan animasi film dan telematika”

Berdasarkan temuan – temuan mengenai rendahnya keterlibatan *stakeholder* dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan pengembangan animasi film dan telematika diatas, maka diperlukan sebuah penelitian untuk mengevaluasi

¹³ Hasil Wawancara dengan BSP, Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Layanan TIK Diskominfoarfus Kota Cimahi, pada tanggal 23 November 2017, Pukul 10.45

¹⁴ Hasil wawancara dengan M, masyarakat Kota Cimahi pada tanggal 8 Mei 2017, pukul 16.15

¹⁵ Hasil wawancara dengan AS, masyarakat Cimahi pada tanggal 8 Mei 2017, pukul 15.50

keberhasilan kebijakan tersebut melalui analisa tentang keterlibatan *stakeholder* di dalam formulasi dan implementasi kebijakan pengembangan animasi film dan telematika di Kota Cimahi. Dengan demikian penelitian ilmiah ini berfokus pada **“Analisis Kritis Pelibatan *Stakeholder* dalam Formulasi dan Implementasi Kebijakan Pengembangan Animasi Film dan Telematika Kota Cimahi”**

1.2 Rumusan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, secara khusus penelitian ini ditujukan menjawab pertanyaan sebagai berikut:

“Bagaimana keterlibatan stakeholder dalam formulasi dan implementasi, serta tanggapan masyarakat terhadap keterlibatan stakeholder dalam Kebijakan pengembangan animasi film dan telematika di Kota Cimahi?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

Menganalisa keterlibatan *stakeholder* dalam formulasi dan implementasi serta respon masyarakat terhadap kebijakan pengembangan animasi film dan telematika di Kota Cimahi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini berguna untuk menilai keberhasilan kebijakan melalui keterlibatan *stakeholder* dalam formulasi dan implementasi kebijakan pengembangan animasi film dan telematika Kota Cimahi. Penilaian keberhasilan kebijakan tersebut akan didasarkan pada

analisa keterlibatan *stakeholder* dalam formulasi dan implementasi kebijakan pengembangan animasi film dan telematika Kota Cimahi.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana keterlibatan *stakeholder* dalam formulasi dan implementasi kebijakan pengembangan animasi film dan telematika Kota Cimahi. Untuk itu sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas enam bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Profil Penelitian, Bab V Pembahasan, Bab VI Kesimpulan dan saran.